

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 21 November 2000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk sesuai dengan UU No. 27/2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004.

Di era otonomi, mengoptimalkan potensi masing-masing daerah untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta birokrasi yang berjalan secara efektif dan efisien merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah. Menitikberatkan otonomi daerah kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berhubungan secara langsung ke masyarakat adalah cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi.

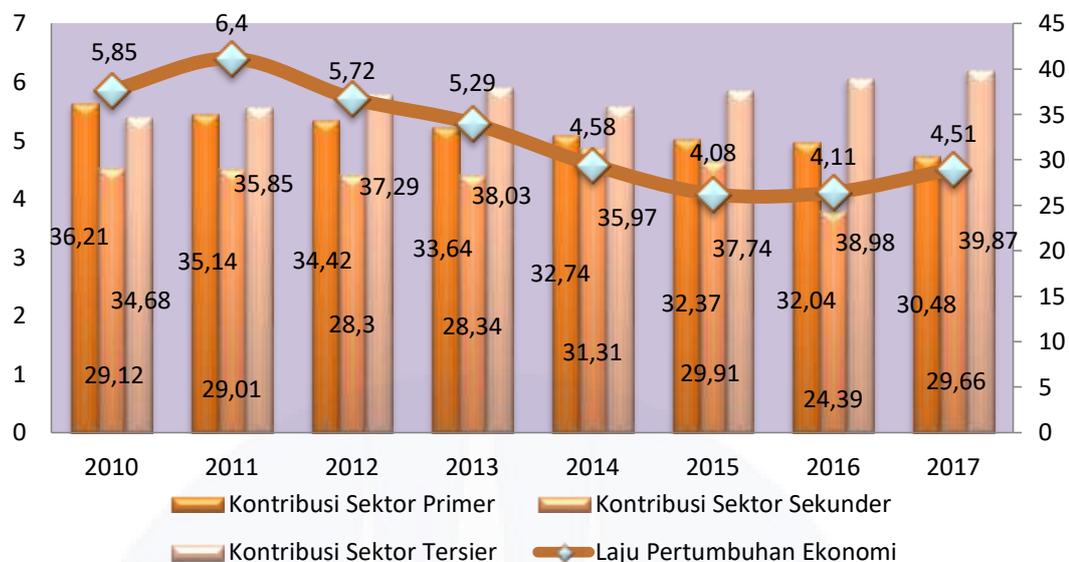
Terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan mampu menunjang perekonomian daerah yang baik dengan mengalokasikan pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya timah, pertanian dan perkebunan, perdagangan, hotel dan restoran, serta masih banyak lagi potensi lainnya yang dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang kinerjanya secara langsung dinilai oleh masyarakat. Kinerja pemerintah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari kinerja keuangannya berupa laporan realisasi APBD yang dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah dengan tujuan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan dan juga sebagai alat untuk menilai efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah (Ropa, 2016). Otonomi daerah yang berhasil adalah otonomi yang mampu menarik investor untuk berinvestasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya kesejahteraan penduduk (Jaya & Dwirandra, 2014).

Pentury (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah daerah harus dapat menyediakan sarana prasarana publik yang baik bagi masyarakat sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal. Produktivitas masyarakat pun akan meningkat dengan mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik karena kunci dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah infrastruktur (Modebe, *et al.* 2012).

Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (dapat dilihat pada Gambar I.1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yaitu 4,51 persen, keadaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan *national economic growth* (pertumbuhan ekonomi nasional) yaitu 5,27 persen (yoy) dan pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,65 persen (yoy) (BPS, 2019).

Gambar I.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, BPS, 2019

Berdasarkan Gambar I.1 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi fluktuatif, terlihat dari kurun waktu 8 tahun (2010-2017), laju tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 6,40 persen, dengan sektor tersier memiliki kontribusi terbesar 35,85 persen, 35,14 persen pada sektor primer dan 29,01 persen pada sektor sekunder. Selain itu, kegiatan perdagangan luar negeri khususnya ekspor dan impor juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu masing-masing senilai Rp18,6 juta dan Rp18 juta (BPS, 2019).

Kondisi terendah sebesar 4,08 persen terjadi pada Tahun 2015, hal tersebut dikarenakan menurunnya permintaan akan produk ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti ikan, lada, karet, timah, dan lain-lain sehingga berdampak pada penurunan produksi dan ekspor barang dan jasa. Selain itu, adanya pemberlakuan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang ekspor logam timah berimbas ke aktivitas pertambangan dan industri peleburan

timah mengalami penurunan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPS, 2019).

Penyediaan aset tetap yaitu sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pengalokasian anggaran belanja modal yang berasal dari APBD adalah sumber dana untuk pembangunan aset tetap tersebut. UU No. 33/2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), *balance fund* (dana perimbangan) (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), serta lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan daerah. Pengoptimalan penerimaan PAD akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah sehingga menurunkan tingkat ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat. Menghitung potensi PAD riil yang dimiliki daerah merupakan langkah penting pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah (Soleh & Heru, 2010). Dampak dari meningkatnya PAD semestinya dapat dirasakan oleh perekonomian daerah (Maryati & Endrawati, 2010)

Masing-masing daerah mempunyai kemampuan pendanaan yang berbeda sesuai kemampuan daerah merealisasikan dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya daerah yang akan menciptakan dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mengatasi ketimpangan fiskal dan infrastruktur di daerah, pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan (DBH, DAU & DAK), dimana hal tersebut berpengaruh pada pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut tingkat penerimaan PAD, DAU dan DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel I.1 Tingkat Penerimaan PAD, DAU dan DAK Tahun 2010-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Tahun | PAD | DAU | DAK |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2010 | Rp328.122.480.078,87 | Rp410.642.308.000 | Rp 8.071.800.000 |
| 2011 | Rp459.208.310.011,69 | Rp481.589.915.000 | Rp 17.880.900.000 |
| 2012 | Rp438.393.355.678,64 | Rp634.087.815.000 | Rp 25.135.650.000 |
| 2013 | Rp495.786.504.873,15 | Rp717.140.118.000 | Rp 44.170.570.000 |
| 2014 | Rp563.108.840.861,42 | Rp806.820.146.000 | Rp 43.372.460.000 |
| 2015 | Rp571.802.890.055,14 | Rp897.887.443.000 | Rp 44.355.816.000 |
| 2016 | Rp574.258.443.819,77 | Rp905.526.208.000 | Rp399.371.719.000 |
| 2017 | Rp709.832.181.818,48 | Rp980.297.314.000 | Rp438.754.793.276 |

Sumber: Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Penerimaan PAD, DAU dan DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017 terlihat bahwa penerimaan PAD dan DAK berfluktuatif, sedangkan untuk penerimaan DAU selalu mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar Rp79 miliar. Penerimaan PAD tertinggi terjadi pada Tahun 2017, terendah Tahun 2010. Terjadi penurunan pada Tahun 2012 dari tahun sebelumnya dengan tingkat penurunan sebesar Rp20,9 miliar. Penerimaan DAU tertinggi terjadi Tahun 2017 dan terendah terjadi Tahun 2010. Tahun 2017 merupakan penerimaan DAK tertinggi dan Tahun 2010 mengalami keadaan terendah.

Putri (2015) dalam penelitiannya menunjukkan PAD signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan DAU berdampak negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Secara simultan PAD & DAU memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian oleh Mawarni, *et al* (2013) serta penelitian oleh Gunantara & Dwirandra (2014) hasilnya secara simultan PAD dan DAU mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan secara terpisah berdampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Maryati & Endrawati (2010); Laloan, *et al* (2018); Hendriwiyanto & Nurkholis (2014), PAD dan DAU berdampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan DAK memiliki pengaruh

negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu penelitian yang berbeda yang telah dilakukan oleh Sunanto (2017) melakukan penelitian dengan hasil penerimaan PAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah efisien, namun tidak efektif.

Penelitian Saad & Kalakech (2009) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan negatif untuk jangka pendek. Muda & Ridha (2018) dalam penelitiannya dengan hasil relasi PAD dan DAU dengan belanja modal (BM) tidak sepenuhnya mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Sugiardi & Supadmi (2014) menyatakan PAD, DAU & SiLPA berdampak positif signifikan terhadap BM. PAD & DAU dapat dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dapat memoderasi SiLPA.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merasa perlu dilakukan riset mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU dan DAK serta pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dipaparkan dilatar belakang, rumusan masalah penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan DAU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 ?

3. Bagaimana efektivitas pengelolaan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 ?
4. Apakah PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
5. Apakah DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
6. Apakah DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
7. Seberapa besar PAD, DAU dan DAK mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti hanya meneliti efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta dampak PAD, DAU dan DAK pada pertumbuhan ekonomi.
2. Laporan yang dianalisis adalah laporan realisasi APBD yaitu data realisasi PAD, DAU dan DAK serta data PDRB triwulanan ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Tahun 2010-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas pengelolaan PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017.

2. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas pengelolaan DAU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas pengelolaan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017.
4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Untuk menganalisa dan mengetahui kemampuan PAD, DAU dan DAK dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu manajemen berkaitan dengan manajemen keuangan guna memberi pengetahuan dan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta dampak PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan informasi kepada *stakeholder* untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dapat dijadikan alternatif masukan dan tambahan informasi mengenai efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta pengaruh PAD, DAU dan DAK pada *economic growth* (pertumbuhan ekonomi) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.6 Sistematika Penulisan

Rincian sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian sesuai dengan masalah yang diambil, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang deskripsi populasi dan sampel penelitian, hasil analisis dan interpretasi data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, keterbatasan penelitian dan saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**